

**PENGADILAN NEGERI
SUNGAILIAT
KELAS I B**



**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
SUNGAILIAT KELAS I B**

**Triwulan IV
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN KE-IV PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS IB

Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Sungailiat
Pada Hari Jumat, 7 Januari 2022

Top Management,



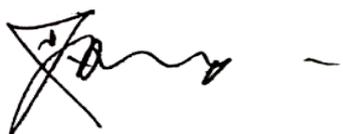
ZULKIFLI, S.H.,M.H.
NIP. 19660809 199603 1 002

Sekretaris Tim Survei,



DESKI ANDRIANSYAH, SH
NIP.19870702 200604 1 001

Ketua Tim Survei,



MUHAMMAD HADLI.,S.H.MH.
NIP.19670515 199303 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sungailiat mengadakan survei ini.

Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungailiat, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sungailiat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sungailiat, Januari 2022

Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	
SURVEI PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Survei persepsi korupsi per indikator	9
3.3. Survei Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	21
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	21
BAB IV	22
PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya survei persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan

dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dengan alamat: ***<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099024>***.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan dengan melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dengan alamat: ***http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099024***.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan / 4 (empat) kali dalam setahun

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Korupsi (SPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri dengan mengisi Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dengan

alamat **<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099024>** melalui komputer Touchscreen yang berada di Lobi depan PTSP.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu per 3 (tiga) Bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang diambil dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dengan alamat: **<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099024>**

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *survei korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan survei persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survei Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala survei tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala survei persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Survei Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
SURVEI PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB mayoritas memiliki latar Dasar Pendidikan SMU (Sekolah Menengah Umum)

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	1	2%
3	SMP	1	2%
4	SLTA	30	70%
5	Diploma 1	0	0%
6	Diploma 2	0	0%
7	Diploma 3	2	5%
8	S1	9	21%
9	S2	0	0%
10	S3	0	0%
Jumlah		43	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 37% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB memiliki pekerjaan Swasta;

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	1	2%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	5	12%
4	SWASTA	16	37%
5	WIRAUSAHA	5	12%
6	TENAGA KONTRAK	2	5%
7	LAINNYA	14	33%
Jumlah		43	100%

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 59 tahun.

Tabel 6.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	14	33%
2	29-39	15	35%
3	40-49	7	16%
4	50-59	6	14%
6	60-69	1	2%
Jumlah		43	100%

3.2. Survei persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil

pada index 4,000 (empat koma nol nol nol) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

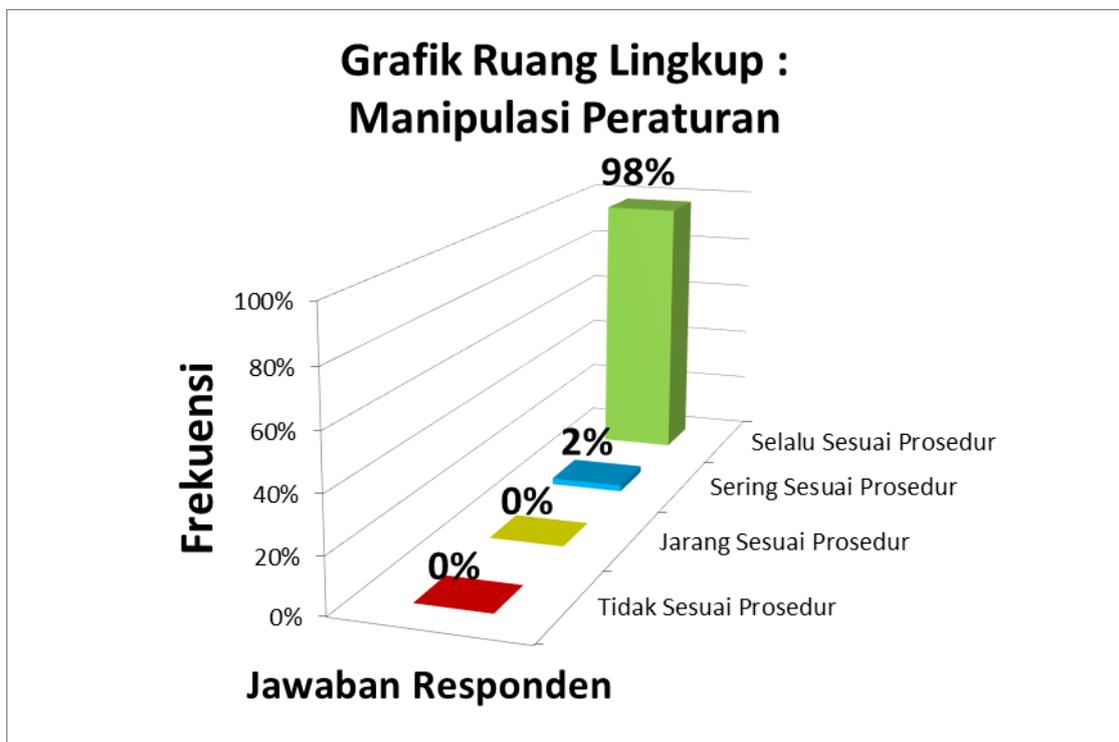
Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB bersih dari dari Korupsi.

Tabel 7.

Survei pada indikator manipulasi peraturan

Apakah Pelayanan oleh Petugas sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu?

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0%
2.	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0%
3.	Sering Sesuai Prosedur	3	1	2%
4.	Selalu Sesuai Prosedur	4	42	98%
Jumlah			43	100%



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

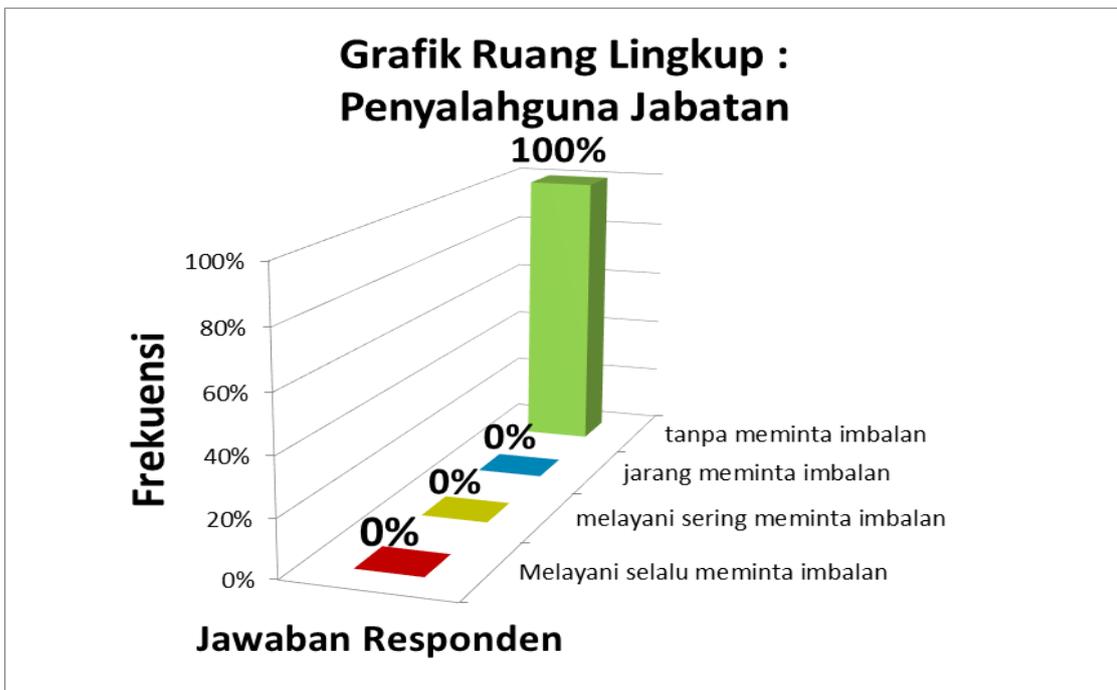
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,000** (empat koma nol nol nol) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB bersih dari dari Korupsi.

Tabel 8.
Survei pada Indikator penyalahgunaan jabatan

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan Secara Cepat dan Mudah Selalu diberikan tanpa ada Penawaran dari Petugas untuk meminta imbalan tertentu?

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Melayani selalu meminta imbalan	1	0	0%
2.	melayani sering meminta imbalan	2	0	0%
3.	jarang meminta imbalan	3	0	0%
4.	tanpa meminta imbalan	4	43	100%
Jumlah			43	100%



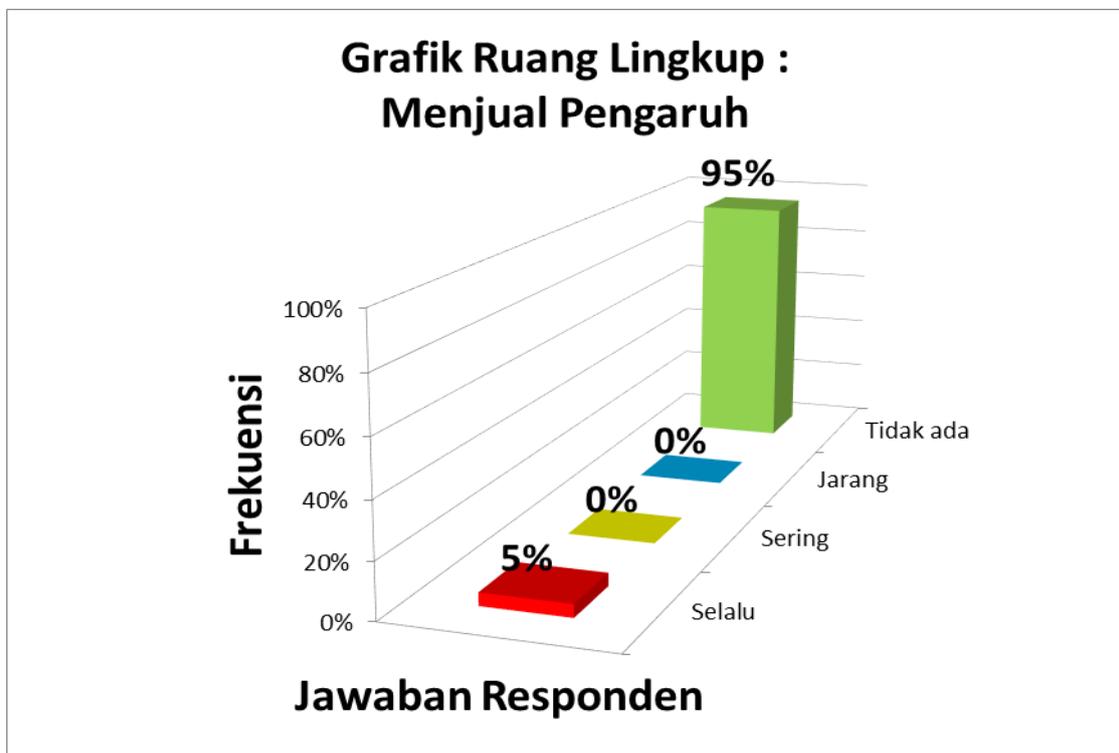
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,86 (tiga koma delapan enam) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat bersih dari dari Korupsi.

Tabel 9.
Survei pada indikator menjual pengaruh
Pernahkah dihubungi oleh seseorang (Karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan Surat/Berkas Perkara?

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	2	5%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	41	95%
Jumlah			43	100%



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00 (empat koma nol nol nol) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

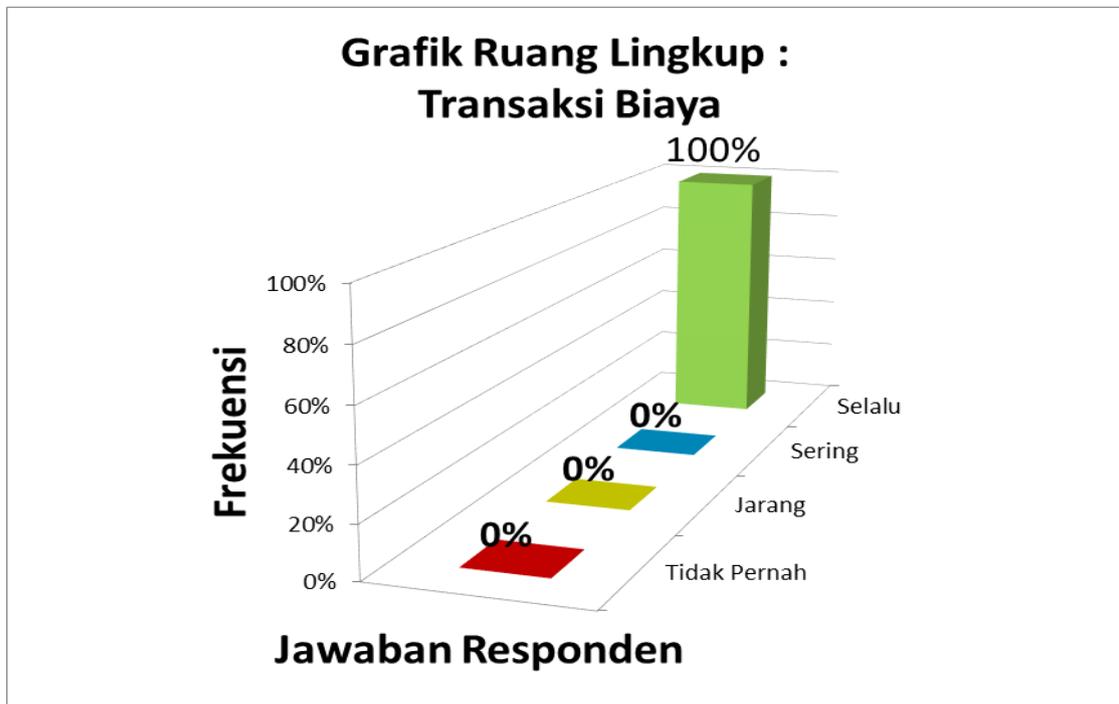
Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB bersih dari dari Korupsi.

Tabel 10.

Survei pada indikator Transaksi Biaya

Apakah selalu Mudah dalam mendapatkan Informasi tentang tarif/Biaya baik melalui Website ataupun petugas layanan?

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	0	0%
2.	Jarang	2	0	0%
3.	Sering	3	0	0%
4.	Selalu	4	43	100%
Jumlah			43	100%



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 (empat koma nol nol) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

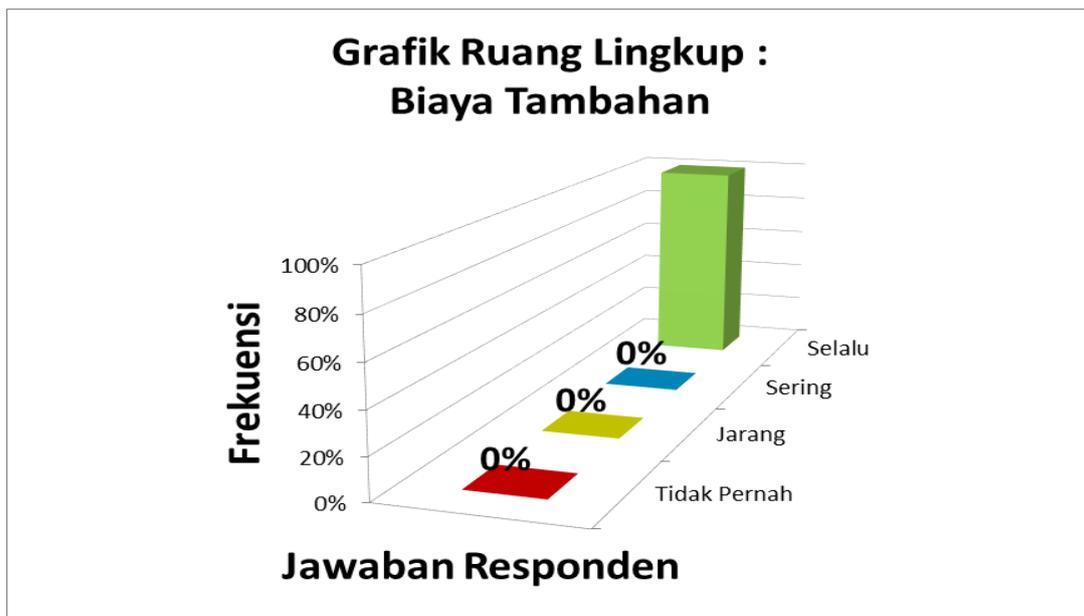
Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB bersih dari dari Korupsi.

Tabel 11.

Tabel survei pada indikator Biaya Tambahan

**Apakah Selalu membayar sesuai dengan tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
(Biaya Tambahan)**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	0	0%
2.	Jarang	2	0	0%
3.	Sering	3	0	0%
4.	Selalu	4	43	100%
Jumlah			43	100%



3.2.6. indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,86 (tiga koma delapan enam) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

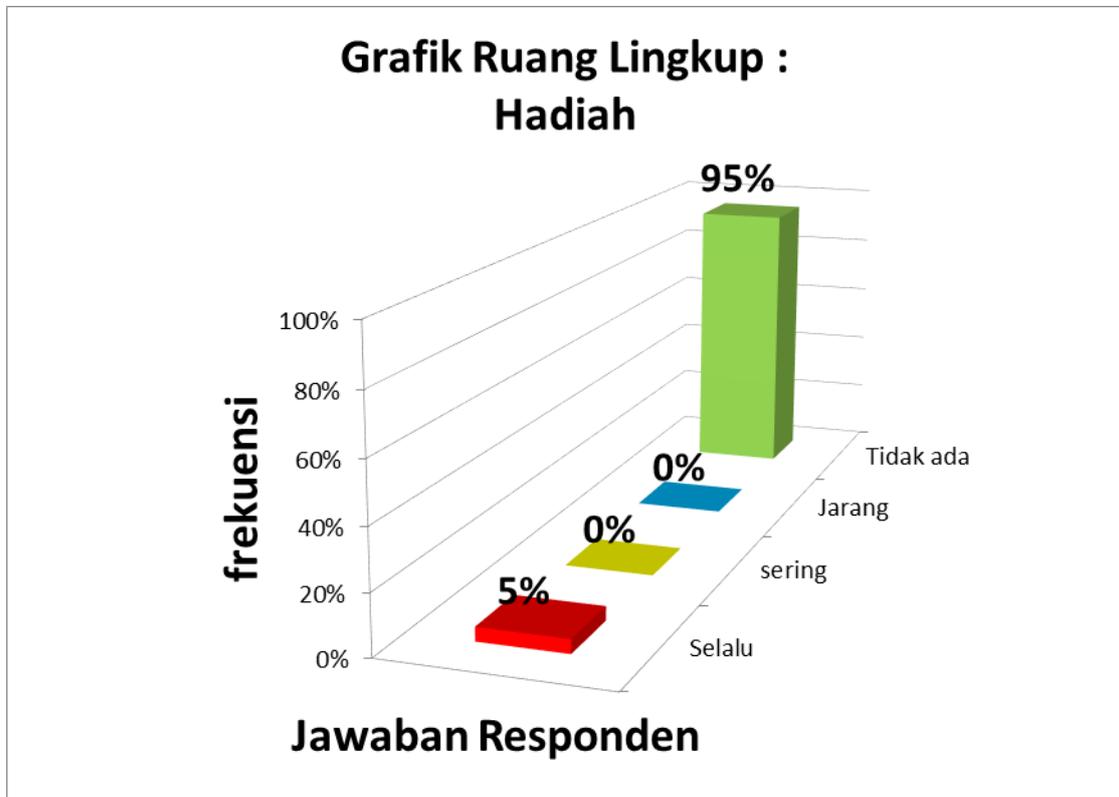
Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB bersih dari dari Korupsi.

Tabel 12.

Survei pada indikator Hadiah

Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)?

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	2	5%
2.	sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	41	95%
Jumlah			43	100%



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

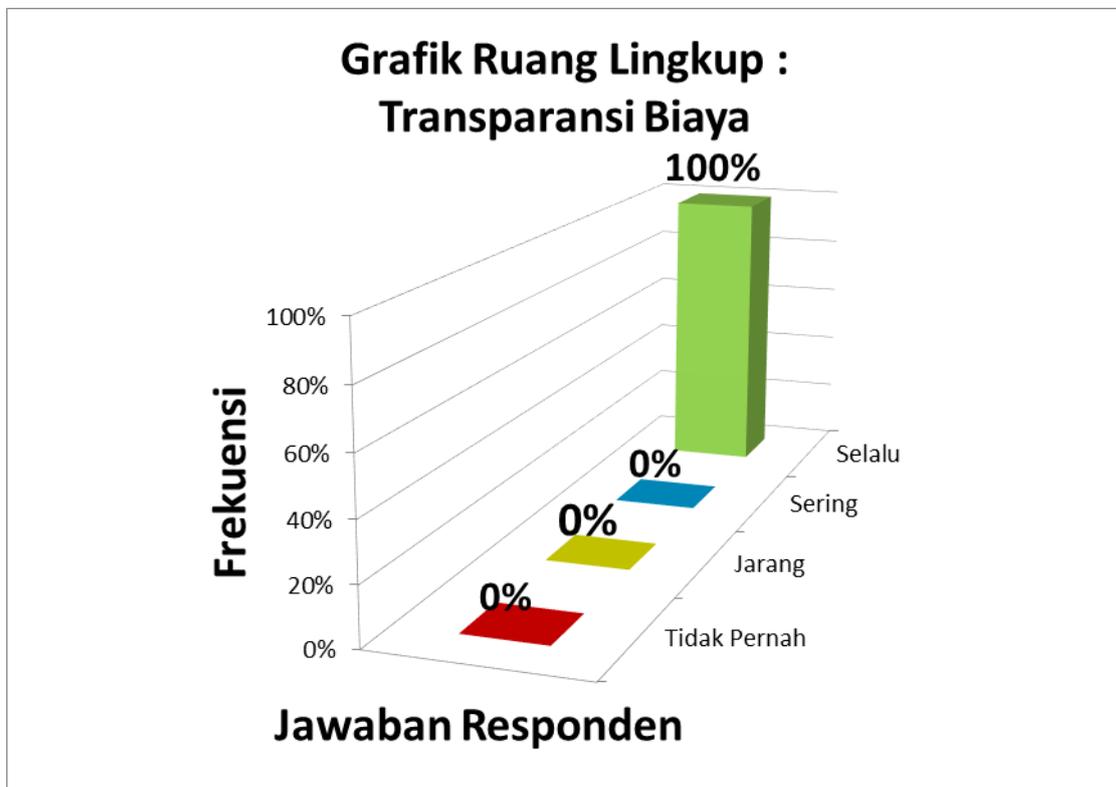
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00 (empat koma nol nol) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 13.
Survei pada indikator Transparansi Biaya

**Menerima Bukti Transaksi Keuangan/pembayaran yang sah
setelah proses pembayaran dilakukan?**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	0	0%
2.	Jarang	2	0	0%
3.	Sering	3	0	0%
4.	Selalu	4	43	100%
Jumlah			43	100%



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,93 (tiga koma sembilan tiga) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

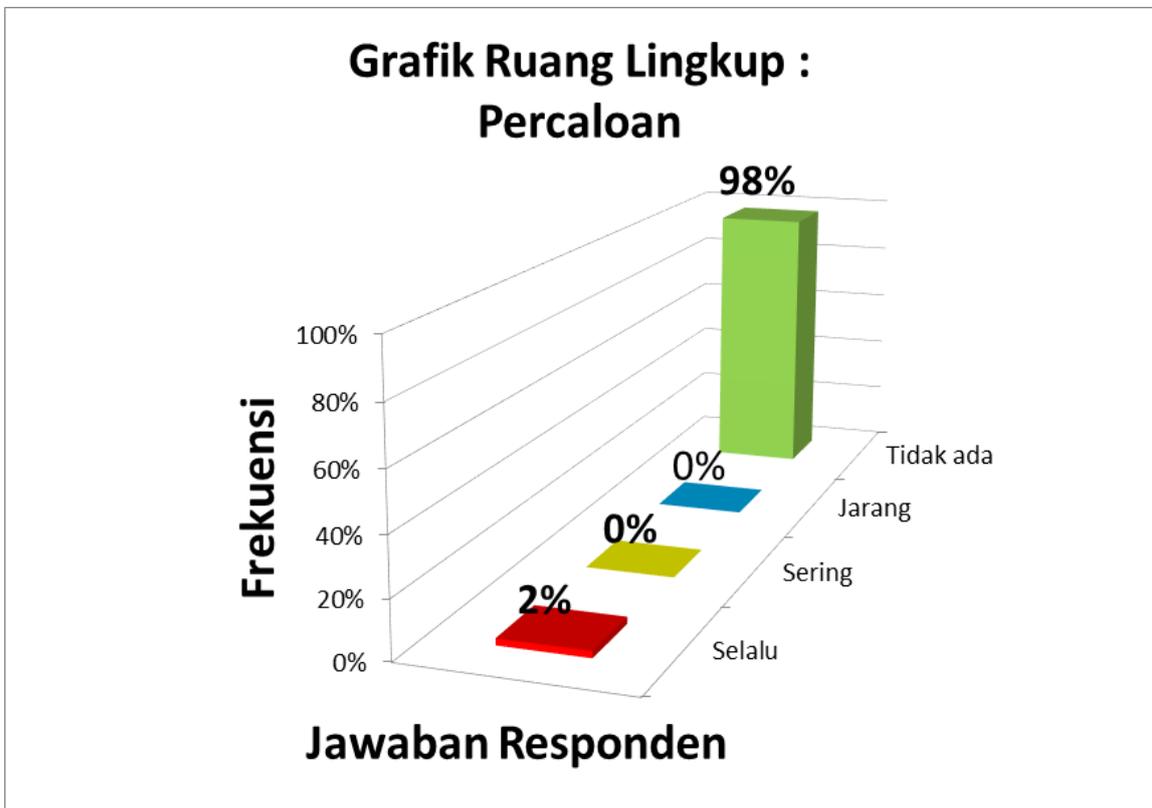
Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat bersih dari dari Korupsi.

Tabel 14.

Survei pada indikator Percaloan

Pernah mengetahui ada praktek Percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	2%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	42	98%
Jumlah			43	100%



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,91 (tiga koma sembilan satu) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

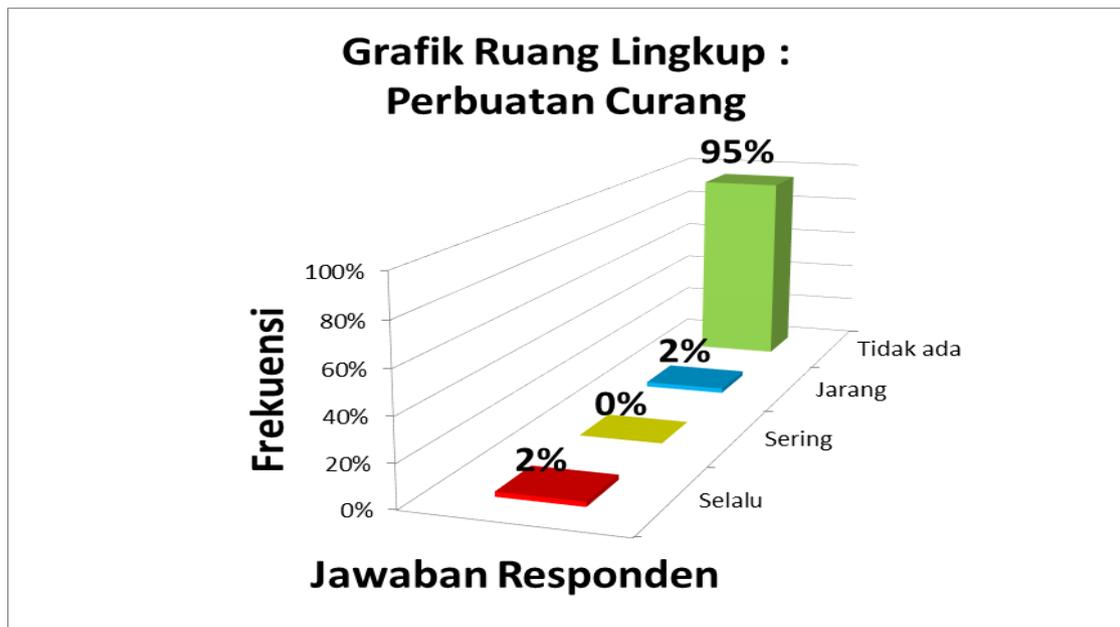
Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 15.

Survei pada indikator Perbuatan Curang

Pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi Praktek KKN di Pengadilan?

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	2%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	1	2%
4.	Tidak ada	4	41	95%
Jumlah			43	100%



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

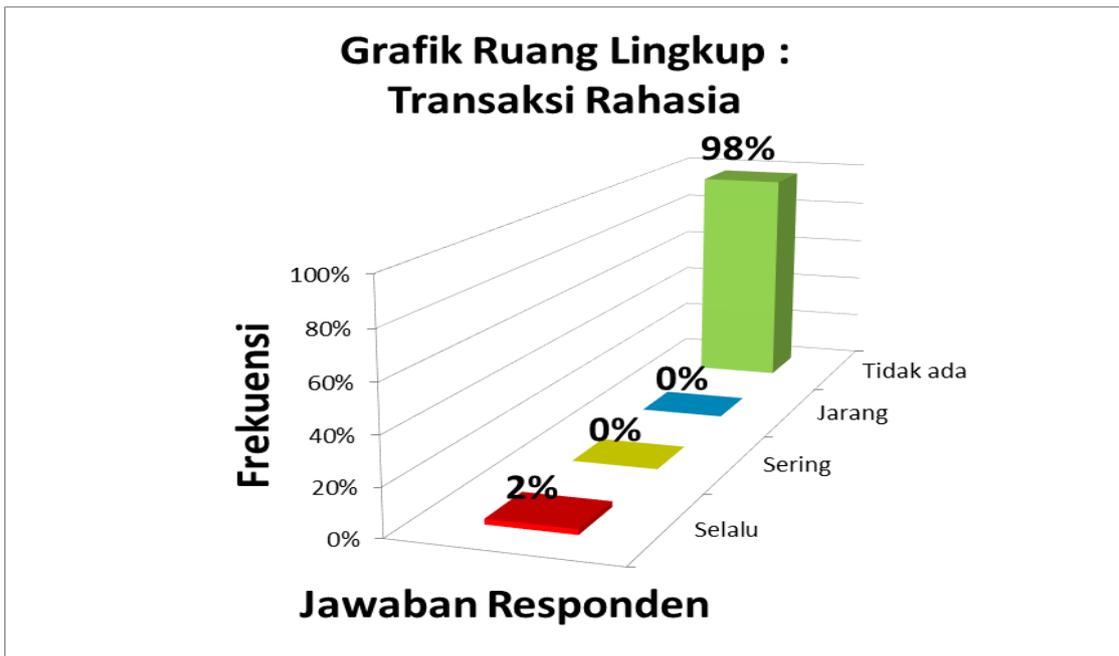
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,93 (tiga koma sembilan tiga) pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Survei dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB bersih dari Korupsi.

Tabel 16.

**Survei pada indikator Transaksi Rahasia
Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf
Pengadilan diluar persidangan?**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	2%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	42	98%
Jumlah			43	100%



3.3. Survei Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari survei 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh **Survei Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB** sebesar **3,95 (tiga koma sembilan lima)** pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Tabel 17.

Tabel Data

Survei Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor survei tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Survei Persepsi Korupsi berada pada angka 3,95 (tiga koma sembilan lima)

Tabel 18.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Survei Persepsi Korupsi, survei

yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

1. OK...tingkatkan
2. Tingkatkan lagi
3. Ok
4. Tingkatkan
5. Ok
6. Sangat baik
7. Pelayanan yang sudah baik, tingkatkan terus
8. Kesan saat petugas Pelayanan sopan santun Dan beretika baik
9. Bagus
10. Tingkatkan lagi
11. Tingkatkan
12. Tingkatkan
13. Tingkatkan pelayanannya
14. Mantap
15. Semoga lebih baik lagi dalam pelayannya
16. Tingkatkan lagi dengan sesuai prosedur
17. Lebih do tingkatkan Pelayanan kepada masyarakat
18. Pertahankan kualitas pelayanan
19. Baik
20. Sejauh INI Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Sungailiat dalam memberikan informasi Dan Pelayanan Sudah sangat sesuai dengan prosedur. Penilaian positif Dari saya bagi PN Sungailiat dalam menunjang sistem peradilan yang cepat, sederhana Dan berbiaya ringan.
21. Bail, Ramah
22. Bail sekali
23. Pelayananya baik Dan petugas ramah
24. Pelayanan baik Dan petugas ramah
25. Tingkatkan lagi
26. Tingkatkan lagi
27. Tingkatkan selalu pelayanan di Pengadilan Negeri Sungailiat

- 28.pelayanan sudah baik
- 29.Tingkatkan
- 30.Tingkatkan
- 31.Sukses selalu Dan pertahankan kualitas, terima kasih
- 32.Tingkatkan
- 33.Pelayanan sangat baik Dan sangat cepat Serta ramah
- 34.tingkatkan terus
- 35.pelayanan sudah baik
- 36.selalu memberikan pelayanan yang baik
- 37.sudah baik
- 38.Tingkatkan terus kinerja
- 39.Pelayanan sudah baik
- 40.Pengadilan sungailiat sukses selalu
- 41.Selalu Ramah
- 42.Baik
- 43.pelayanan yang baik
- 44.Pelayanan sangat baik, terus tingkatkan
- 45.Pertahankan Pelayanan yg telah bagus ini
- 46.Sangat baik
- 47.Cukup memuaskan
- 48.Baik
- 49.Memuaskan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB memiliki Survei Persepsi Korupsi **3,95 (tiga koma sembilan lima) atau** masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**

Survei persepsi tersebut merupakan komposit dari survei 10 indikator yang masing-masing memiliki survei sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat survei 3,977 (tiga koma sembilan tujuh tujuh);
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat survei 4,000 (empat koma nol nol nol);
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat survei 3,860 (empat koma nol nol nol);
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat survei 4,000 (empat koma nol nol nol);
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat survei 4,000 (empat koma nol nol nol);
6. Indikator Hadiah, mendapat survei 3,860 (tiga koma delapan enam nol);
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat survei 4,000 (empat koma nol nol nol);
8. Indikator Percaloan, mendapat survei 3,930 (tiga koma sembilan tiga nol);
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat survei 3,907(tiga koma sembilan nol tujuh);
10. Indikator transaksi Rahasia, mendapat survei 3,930 (tiga koma sembilan tiga nol);

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator **“Penyalahgunaan Jabatan”** Dengan nilai rata rata yaitu 4,000 (empat koma nol nol nol), disusul Indikator **“Transaksi Biaya”** dengan nilai rata rata yaitu 4,000 (empat koma nol nol nol) dan Indikator **“Biaya Tambahan”** dengan nilai rata rata yaitu 4,000 (empat koma nol nol nol);

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling rendah berada pada Indikator **“Menjual pengaruh”** Dengan nilai rata rata yaitu 3,860 (tiga koma delapan enam nol), disusul Indikator **“Hadiah”** dengan nilai rata rata yaitu 3,860 (tiga koma delapan enam nol) dan Indikator **“Perbuatan Curang”** dengan nilai rata rata yaitu 3,907 (tiga koma sembilan nol tujuh);

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil survei persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB triwulan ke IV (Ke empat) Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki survei **di atas 3,26** sampai dengan 4,00 atau **masuk pada persepsi bersih dari korupsi** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator **“Penyalahgunaan Jabatan”** Dengan nilai rata rata yaitu 4,000 (empat koma nol nol nol), disusul Indikator **“Transaksi Biaya”** dengan nilai rata rata yaitu 4,000 (empat koma nol nol nol) dan Indikator **“Biaya Tambahan”** dengan nilai rata rata yaitu 4,000 (empat koma nol nol nol), **selain itu juga**, berdasarkan peringkat

Indikatornya, diperoleh 3 (tiga) nilai paling rendah berada pada Indikator **“Menjual pengaruh”** Dengan nilai rata rata yaitu 3,860 (tiga koma delapan enam nol), disusul Indikator **“Hadiah”** dengan nilai rata rata yaitu 3,860 (tiga koma delapan enam nol) dan Indikator **“Perbuatan Curang”** dengan nilai rata rata yaitu 3,907 (tiga koma sembilan nol tujuh);

KOMPUTER TOUCHSCREEN DI MEJA PTSP
yang berisi Aplikasi SISUPER BADILUM
untuk mengisi SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
dengan alamat
***[http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
index.php/ pengadilan/099024](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099024)***



DAFTAR PERTANYAAN SPK

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
 - Tidak Sesuai Prosedur
 - Jarang Sesuai Prosedur
 - Sering Sesuai Prosedur
 - Selalu Sesuai Prosedur

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
 - Petugas melayani selalu meminta imbalan
 - Petugas melayani sering meminta imbalan
 - Petugas melayani jarang meminta imbalan
 - Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
 - Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
 - Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
 - Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
 - Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
- Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada